

NKRI Harga Mati atau Papua Merdeka Harga Mati

Umar Werfete

Pendahuluan

Isu di Papua masih didominasi oleh dua narasi besar yang kontra produktif yakni, narasi tentang “Indonesia harga mati” pada satu poros dan “ Papua merdeka /referendum harga mati pada poros sebaliknya. Kedua narasi ini memiliki ruang ekspresi masing-masing serta memiliki audiensnya sendiri. Perang antar kedua narasi ini telah berlangsung lama dan semakin menguat paskah jatuhnya Orde Baru (1966-1998). Jatuhnya Orde Baru tidak hanya menandai dimulai era keterbukaan dan demokrasi tapi menjadi awal kebangkitan kembali identitas Papua, dimana pada tanggal 26 Februari 1999, perwakilan rakyat Papua yang terdiri dari 100 tokoh meminta secara resmi kepada presiden BJ Habibie agar memerdekakan Papua. Selanjutnya, narasi itu menjadi lebih kokoh setahun kemudian dimana pada bulan Mei tahun 2000, rakyat Papua menyelenggarakan Kongres Papua II di Jayapura dimana bendera bintang kejora diizinkan berkibar oleh presiden Abdurahman Wahid (1999-2001). Kongres itu berhasil membentuk Presidium Dewan Papua (PDP) yang dipimpin oleh Theys H Eluay. Sejak terbentuk PDP menjadi satu badan resmi yang mewakili rakyat Papua untuk melakukan kampanye mencari dukungan kemerdekaan Papua di dalam dan luar negeri.

Narasi Papua merdeka itu kemudian direspon dengan narasi NKRI harga mati. Narasi ini adalah narasi yang dibangun oleh militer, sehingga pendakotannya juga dengan umumnya melalui operasi militer maupun non militer, ternasuk pemakzulan presiden Abdurahman Wahid oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 23 Juli 2000, karena dianggap mendukung kemerdekaan Papua. Ia kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Tanggal 10 November 2001 atau kurang lebih empat bulan setelah Megawati menjabat, Theys Eluway dibunuh oleh satuan Komando Pasukan Khusus (Kopasus) di Jayapura. Lokasi pembunuhan ketua PDP itu kemudian dibangun tugu kematian dengan lambang bintang kejora, sebagai narasi perlawanan abadi, demikian juga dengan makam Theys Eluay yang berada di tepi jalan poros Sentani – Kota Jayapura. PDP sebagai badan yang dipercayakan rakyat Papua untuk memajukan hak-hak mereka menuju kemerdekaan akhirnya tak berdaya dan anggotanya tercerai-berai.

Polarisasi Akibat Isu Pemekaran

Lebih jauh, perang dua narasi ini telah masuk pada ranah *geo-spatial*. Pemetaan wilayah provinsi baru di Papua tidak lepas dari perang narasi antara NKRI harga mati dan Papua merdeka/referendum harga mati. UU No. 45/1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Puncak Jaya, Timika dan Kota Sorong yang telah ditangguhkan oleh presiden BJ Habibie karena mendapat penolakan di Papua kembali diaktifkan oleh Megawati dengan menerbitkan Inpres Nomor 1/2003 untuk mempercepat implementasi UU No. 45/1999. Provinsi Papua Tengah memang belum berhasil, diwujudkan meskipun telah dideklarasikan, namun Provinsi Irian Jaya Barat (Iriabar) berhasil diwujudkan dan Brigjen TNI (purn) Abraham Octavianus Ataruri dilantik sebagai gubernur. Selanjutnya, tahun 2007 nama Irian Jaya Barat dirubah menjadi Papua Barat¹. Dengan terbentuknya provinsi ini telah memutuskan kuatnya narasi Papua merdeka di wilayah kepala

¹ Lihat Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2007

burung Papua yang memang memiliki basis kuat NKRI Harga mati,² sehingga mempersempit ruang narasi Papua merdeka. Tidak hanya itu, pergantian nama dari Irian Jaya Barat menjadi Papua Barat juga telah mengambil alihan nama “Papua Barat” atau “*West Papua*” sebagai sebuah negara yang sedang diperjuang oleh kelompok pro kemerdekaan, menjadi hanya sebuah provinsi di Papua oleh pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, pada pertengahan 2019, pasca insiden rasis yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, pemerintah mengumumkan rencana pembentukan dua provinsi baru setelah bertemu perwakilan enam puluh tokoh Papua yang difasilitasi oleh kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dua provinsi itu adalah provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah. Wilayah Provinsi Papua Tengah dimaksudkan meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Pania, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yapen. Sedangkan, wilayah provinsi Papua Selatan meliputi Kabupaten Mappi, Boven Digoel, Asmat dan Merauke serta akan menambahkan kota Merauke.

Dua wilayah calon provinsi baru ini memiliki latar isu politik dan keamanan yang berbeda. Wilayah Papua Tengah memiliki rekam jejak konflik politik dengan negara yang kuat, Kasus Wamena 1977/1998³ kasus Biak berdarah 2 Juli 1998 dan kasus Wamena berdarah pada 4 April 2003⁴ yang dikategorikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Sedangkan wilayah Papua Selatan gerakan-gerakan resistensi terhadap NKRI cenderung lemah paskah tewasnya pimpinan TPN-OPM wilayah Merauke-Boven Digul, Wilem Onde pada September 2021⁵ Elemen –elemen penggerak seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) tidak mendapatkan ruang untuk mengekspresikan pandangan mereka. Dalam beberapa kasus anggota KNPB ditangakat di kantor mereka ketika hendak menrencanakan aksi demonstrasi, bahkan ada yang ditahan ketika sedang berada di kantor polisi untuk mengajukan ijin demonstrasi⁶.

Pada sisi yang lain, polarisasi masyarakat yang terbentuk melalui dua provinsi baru ini tidak hanya soal NKRI harga mati versus Papua merdeka harga mati, tetapi juga akan membentuk polarisasi antara ‘suku-suku di Papua, apalagi jika pembagian provinsi didasarkan atas wilayah adat, maka akan ada dominasi satu suku tertentu. Pada level kabupaten bahkan ada kabupaten yang namanya diambil dari suku mayoritas⁷ yang berpotensi menumbulkan konflik antar suku di Papua, terutama ketika pemilihan kepala daerah. Ketika memasukan Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Waropen dan Yapen yang berada pada wilayah adat *Saireri* di pesisir pantai ke dalam wilayah Provinsi Pegunungan Tengah sebagai mana direncanakan pemerintah pusat, itu tentu tidak tepat dan bahkan akan memperuncing dikotomi ‘gunung versus pantai’. Masyarakat di wilayah adat *Saireri* tidak akan menerima itu, oleh itu sebab mereka akan keluar dan berusaha untuk membentuk provinsi baru atau bergabung dengan wilayah adat *Tabi* yang berada di pesisir pantai utara Papua.

² Ricahard Chauvel (2005) *Constructing Papuan Nationalism; History, Ethnicity and Adaptation*. Policy Studies 14. East-West Center Wahington.

³ Muridan Widjojo (2006) *Non-State Actors and the Cycle of Violence in Papua*, LIPI

⁴ KOMNAS HAM (2019) *Peristiwa Wamena adalah Tragedi Kemanusiaan*. Tersedia [online] pada <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/10/22/1225/komnas-ham-peristiwa-wamena-adalah-tragedi-kemanusiaan.html>. Diakses tanggal 20-08-2021

⁵ Kontras (2004) *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel, Papua*, (hal. 45)

⁶ ICP (2017) *Human Rights in Papua 2017*, The fifth report of International Coalition for West Papua (ICP) Covering events from January 2015 until December 2016. IPC, Wuppertal Geneva.

⁷ I Nyoman Sudira, et al (2000) *Pembangunan, Marginalisasi dan Diintegrasi Papua*, Imparsial

Jika dua provinsi baru di Papua itu berhasil diwujudkan maka, tiga provinsi yang berada di pesisir Papua (Papua Barat, Papua Selatan dan Saireri-Tabi) akan menjadi wilayah yang didominasi oleh pendukung NKRI Harga Mati, sebaliknya satu wilayah di pegunungan (Provinsi Papua Tengah) masih tetapi menjadi basis gerakan kemerdekaan Papua. Sehingga tiga provinsi di pesisir pantai ini tidak hanya menjadi *panopticon* atau menara pengawas tapi juga sebagai *great wall* untuk menghambat arus gerakan kemerdekaan Papua. Dengan demikian, ruang ekspresi akan semakin sempit dan audiens juga akan semakin berkurang, bahkan perlahan –lahan menghilang. Namun demikian, ruang ruang ekspresi itu tidak terbatas pada ruang fisik, masih ada ruang virtual yang terbuka luas. Dan saat ini pertarungan kedua narasi ini tetap terbuka luas di media sosial. Kini kedua narasi itu akan terus bertarung di ruang virtual melalui surat kabar *online* maupun *blog* dan berbagai *platform* media sosial.

Di tengah potensi konflik yang tinggi itu, narasi alternative tentang ‘Papua tanah damai’ sungguh penting untuk terus dibangun bahkan mungkin perlu *rebranding* melalui ruang-ruang virtual dan ruang-ruang fisik sehingga narasi ini kembali menguat dan juga mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Wacana dialog Jakarta- Papua yang sedang digalang perlu juga mengelaborasi sudut pandang lain, terutama pihak-pihak yang hedak dilibatkan dalam dialog.